

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini berimplikasi pada daerah-daerah untuk memiliki hak, kewenangan dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah daerah (Pemda) juga memiliki kewenangan dalam mengontrol terlaksananya anggaran daerah (APBD) dibawah pengawasan pemerintah pusat.

Kewajiban Desentralisasi yang selanjutnya lebih dikenal dengan kebijakan Otonomi Daerah. Kebijakan ini lahir karena melihat perkembangan kondisi didalam negeri yang menunjukkan keinginan dari rakyat untuk keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Selain itu kondisi dunia secara global pun mengindikasikan semakin kuatnya arus globalisasi yang tentunya menuntut adanya daya saing yang kuat antar tiap Negara. Upaya penguatan daya saing Negara secara umum dapat dicapai bila pemerintah daerahnya memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada didaerahnya sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah. Maka dari itu tujuan program Otonomi Daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi

kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini dapat ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri.

Dengan Otonomi Daerah, Pemerintah daerah lebih berhak dalam membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Peningkatan hak dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahannya. Peningkatan tanggung jawab disini diantaranya adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai program-program yang dijelankannya.

Diterapkannya desentralisasi fiskal juga merupakan konsekuensi logis dari adanya pelimpahan wewenang kepada daerah untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sehingga mengharuskan daerah mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi untuk terwujudnya peningkatan diberbagai sektor, terutama sektor publik. Permasalahan yang mulai timbul dari adanya penerapan desentralisasi fiskal diantaranya kemampuan keuangan daerah yang harus dapat dipenuhi dengan pendanaan sendiri. Keadaan tersebut memaksa pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mengolah serta menggali aset daerah sehingga dapat menghasilkan sumber-sumber pendanaan daerah.

Berdasarkan regulasi pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sejalan dengan adanya pelimpahan wewenang serta adanya undang-undang yang mengatur sumber pendanaan daerah, hal tersebut menjadi peluang serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk dapat menggali dan mengoptimalkan potensi (keuangan lokal) khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya. Besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diharapkan mampu untuk meningkatkan Investasi Belanja Modal Pemerintah Daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Namun, pada kenyataannya tidak semua daerah mampu membiayai pengeluaran daerah dengan menggunakan PAD. Hal tersebut terjadi karena kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi menjadi bentuk aktivitas yang menunjang perekonomian. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan daerah akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh daerah. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), suatu daerah diharapkan mampu memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pada data statistik keuangan yang diterbitkan oleh BPS Jawa Barat, Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat itu sendiri selama tahun 2014-

2017 memiliki tingkat Pendapatan Asli Daerah yang cenderung mengalami peningkatan.

Peningkatan kemampuan keuangan daerah sangat diharapkan terjadi saat ini. Keuangan daerah yang meningkat berpengaruh pada kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh daerah. Aktivitas ekonomi yang berjalan baik pada suatu daerah menggambarkan tingkat pertumbuhan daerah tersebut baik. Sehingga, mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut sehingga berdampak pada peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terutama yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erdi Adytama dan Rachmawati Meita Oktaviani, (2015) bahwa Pendapatan Asli Daerah yang tinggi selanjutnya oleh pemerintah daerah akan digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal.

Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan daerah dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas dan kemampuan suatu daerah penyelenggara otonomi daerah. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kembali kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga

diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan pertumbuhan. Derajat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah dan efektivitas adalah rasio yang paling banyak digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah. Selain itu, rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2017) dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah di Indonesia adalah relative kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat lebih mendominasi susunan APBD. Hal inilah yang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah agar bisa menjadi daerah yang

mandiri dalam pengelolaan keuangan dan mengurangi ketergantungan pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau pihak eksternal.

Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam perekonomian. Begitu pula dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu terdapat unsur pendapatan dan belanja. Alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah salah satunya dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Namun, pada dasarnya alokasi belanja modal digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah ataupun untuk fasilitas publik. Pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan terjadi, salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu adanya peningkatan infrastruktur publik. Belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur publik. Semakin tinggi nilai belanja modal maka semakin tinggi pula diharapkan dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Adanya peningkatan infrastruktur publik secara normatif akan meningkatkan kualitas layanan publik dan secara perlahan akan meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan ekonomi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat.

Belanja Modal adalah pengeluaran rutin pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah. berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Sedangkan dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 belanja

modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembagunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Keuangan dapat dijadikan sebagai variabel yang mempengaruhi Belanja Modal. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Diah Nurdiwaty, dkk (2017), menghasilkan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan secara signifikan mempengaruhi Belanja Modal. Namun, hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018) yang menghasilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Suwandi, dkk (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa rasio-rasio dalam kinerja keuangan diantaranya rasio derajat desentralisasi fiskal dan ketergantungan fiskal memiliki pengaruh negatif pada alokasi belanja modal dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaruh positif pada alokasi belanja modal.

Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan memiliki potensi daerah khususnya di bidang pariwisata dan budaya yang sangat besar. Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan

menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015-2017 Provinsi Jawa Barat adalah yang terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Dengan besarnya potensi daerah dan besarnya realisasi APBD Provinsi Jawa Barat diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana utama dalam pemerintah daerah untuk pembiayaan kegiatannya selain menggunakan Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Menurut data anggaran yang di terbitkan oleh kementerian, porsi belanja pegawai untuk kabupaten/kota di Indonesia masih menempati peringkat tertinggi yaitu mencapai 44,8 persen ditahun 2010, belanja modal mencapai 21,7 persen dan belanja barang 18,5 persen, serta sisanya sebesar 15,1 persen untuk jenis belanja lainnya. Tetapi beberapa tahun terakhir belanja modal mengalami peningkatan, itu terjadi karena pemerintah beranggapan bahwa pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, Pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan. Cara menambah alokasi belanja modal ialah berhemat pada belanja

pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai dapat ditekan dengan tidak merekrut pegawai baru kecuali guru, dokter dan perawat. Belanja barang dapat dihemat dengan mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu. Dilihat dari data statistik keuangan yang diterbitkan oleh BPS Jawa Barat, Kontribusi PAD seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat berkisar antara 7,64 persen sampai 50,91 persen pada tahun 2018, sementara kontribusi dana perimbangan berkisar antara 31,16 sampai 75,63 persen, sisanya persentase pendapatan yang bersumber dari pendapatan lain yang sah. Dengan kata lain, peranan PAD hampir di kabupaten/kota Jawa Barat yang relatif kecil mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan keuangan PEMDA kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat. Ini berarti kebutuhan pembiayaan pengeluaran kabupaten/kota sebagian besar didanai oleh transfer uang dari pemerintah pusat. Realisasi pos belanja pegawai total 27 kabupaten/kota (dari belanja langsung dan tidak langsung) berkisar antara 52,10 persen sampai 54,19 persen pada tahun 2018 dari total belanja daerah. Dari kenyataan tersebut, dapat dilihat walaupun pembiayaan daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat, tidak menutup kemungkinan bahwa pendapatan asli daerah pun sebagian besar habis untuk belanja pegawai. Maka dari itu diperlukan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat untuk menghitung kinerja keuangan daerah tersebut dan bagaimana pengaruh dari kinerja keuangan tersebut terhadap belanja modalnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja

Keuangan Terhadap Belanja Modal (Sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2014-2018)”).

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya dengan Rencana Penelitian Penulis

Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman, dan Efda Kristinawati (2017)	- Menggunakan PAD sebagai variabel independen. - Menggunakan Belanja Modal sebagai variabel Dependen.	Menggunakan Pertumbuhan Ekonomi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai Variabel Independen.	PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan Lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol.17, No.1, Juli 2017. ISSN: 2579-3217. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
Febdwi Suryani dan Eka Pariani (2018)	- Menggunakan PAD sebagai variabel independen. - Menggunakan Belanja Modal sebagai variabel Dependen.	Menggunakan Dana Alokasi Umum sebagai Variabel Independen.	PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Vol 6, No 1, 2018. E-ISSN: 2598-3253. FKIP UI
Afina Dwi Sartika (2017)	- Menggunakan PAD dan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Independen.	- Menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Dependen. - Menggunakan Belanja Modal sebagai Intervening.	PAD berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal tidak mampu memediasi pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal tidak mampu	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

			memediasi pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Petumbuhan Ekonomi.	
Erdi Adyatma dan Rachmawati Meita Oktaviani (2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan PAD sebagai Variabel Independen. - Menggunakan Belanja Modal sebagai Variabel Dependen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan DAU sebagai Variabel Independen. - Menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. 	PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan antara PAD dengan Belanja Modal dan DAU dengan Belanja Modal.	Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Nopember 2015. ISSN :1979-4878. FEB Universitas Stikubank.
Suwandi, Kurni Adi, dan Afrizal Tahar (2015)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Independen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Dependen. - Menggunakan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. 	Rasio Efektivitas PAD memiliki pengaruh positif pada alokasi Belanja Modal, dan rasio derajat desentralisasi dan rasio ketergantungan memiliki pengaruh negative terhadap alokasi belanja modal.	Jurnal Akuntansi dan Investasi Universitas Trunojoyo Madura.
Shinta N.A, Ahmad Kudhori, dan Tri Lestariningsih (2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Independen. 	Menggunakan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Independen.	Kota Madiun telah semakin mandiri dalam hal keuangan daerahnya, sehingga tidak banyak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dan kontribusi penerimaan daerah terutama PAD masih	Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 1 2017 ISSN.: 2528 – 6145. Politeknik Negri Madiun.

			kecil terhadap Belanja Modal.	
Andreas Marzel Palealu (2013)	- Menggunakan PAD sebagai Variabel Independen. - Menggunakan Belanja Modal sebagai Variabel Dependen.	Menggunakan DAK sebagai Variabel Independen.	DAK dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal EMBA, 1189 Vol.1 No.4 Desember 2013 ISSN 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado.
Novira Sartika, Kirmizi, dan Novita Indrawati (2017)	- Menggunakan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Independen. - Menggunakan Belanja Modal sebagai Variabel Dependen.	Menggunakan Faktor-faktor dalam Struktur APBD sebagai Variabel Independen.	DBH dan DAU memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Modal, dan Rasio-rasio dalam Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	SOROT Volume 12, Nomor 2, Oktober 2017: 121-135. BAPPEDA Kabupaten Siak.
I Ketut Arsa dan Nyoman Djinar Setiawina (2015)	- Menggunakan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Independen.	Menggunakan Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Dependen.	Deraja Desentralisasi dan Efektivitas PAD berpengaruh positif pada alokasi Belanja Modal, ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal, sedangkan kemandirian keuangan tidak berpengaruh pada alokasi Belanja Modal.	Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, Agustus 2015. FEB Universitas Udayana Bali.
Achmad David Hermawan (2016)	- Menggunakan PAD sebagai Variabel Independen. - Menggunakan Belanja Modal sebagai Variabel Dependen	Menggunakan DAU dan DAK sebagai Variabel Independen.	PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Journal Riset Mahasiswa xxxxxxx (JRMx) ISSN: 2337-56xx. Volume: xx, Nomor: xx. FEB Universitas Kanjuruhan.
Dini Arwati dan Novita Hadiati (2013)	- Menggunakan PAD sebagai	Menggunakan Pertumbuhan Ekonomi dan	Perumbuhan Ekonomi berpengaruh	SEMANTIK 2013, ISBN: 979-26-0266-6.

	Variabel Independen. - Menggunakan Alokasi Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Dependen.	DAU sebagai Variabel Independen.	terhadap pengalokasian anggaran belanja modal tetapi tidak signifikan, PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan DAU tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.	Universitas Widyatama Bandung.
Ni Putu Dwi Eka R.S dan Ni Luh Supadmi	- Menggunakan PAD sebagai Variabel Independen. - Menggunakan Belanja Modal sebagai Variabel Dependen.	- Menggunakan DAU dan SILPA sebagai Variabel Independen. - Menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi.	PAD, DAU dan SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014). ISSN: 2302-8556. FEB Universitas Udayana Bali.
Rully Farel (2015)	- Menggunakan PAD sebagai Variabel Independen. - Menggunakan Belanja Modal sebagai Variabel Dependen.	Menggunakan PDRB dan SILPA sebagai Variabel Independen.	PDRB, PAD, dan SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.	Signifikan Vol. 4 No. 2 Oktober 2015. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
Asepma Hygi Prihastuti, Taufeni Taufik, dan Restu Agusti (2015)	- Menggunakan Kinerja Keuangan sebagai Variabel	Menggunakan Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Dependen.	Kinerja Keuangan memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal, dan kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.	Jurnal SOROT, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2015 halaman 143 – 154 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau.
Riri Zelmianty (2016)	- Menggunakan Belanja Modal sebagai Variabel Dependen.	Menggunakan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan	Kemandirian daerah berpengaruh signifikan	JRAK. Vol.7 No.1. Februari 2016. Universitas

		sebagai Variabel Independen.	negatif terhadap belanja modal, rasio efektifitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal, SILPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan negative terhadap belanja modal.	Islam Bekasi. 45
Maharani Sinta Dewi (2015)	- Menggunakan Pendapatan Asli Daerah (<i>Original Local Government Revenues/Regional Revenue</i>) sebagai Variabel Independen.	Menggunakan DAU (<i>General Allocation Funds</i>) dan DAK (<i>Special Allocation Funds</i>) sebagai Variabel Independen. - Menggunakan Belanja Daerah (<i>Local Government Expenditures</i>) sebagai Variabel Dependen.	<i>that partially, original local government revenue and special allocation fund have influence significantly to the local government expenditure on district in south sumatera. While general allocation fund han on influence significantly to the local government expenditure on district in south sumatera province. Silmutanneously, original local government revenue, general allocation fund and special allocation fund influence significantly to the local government expenditure.</i>	<i>International Journal of International Program Accounting Department Faculty of Economic and Business Syarif Hidayatullah Islamic State University, Jakarta. (2015)</i>

<p>Abdul Pattawe, Djayani Nurdin, Nurhayati Haris, dan M. Iqbal Bakri (2017)</p>	<p>- Menggunakan Belanja Modal (<i>Capital Expenditures</i>) sebagai Variabel Dependen.</p>	<p>- Menggunakan Pendapatan Daerah (<i>Local Revenue</i>) dan Dana Perimbangan (<i>Matching Grant</i>) sebagai Variabel Independen. - Menggunakan Pertumbuhan Ekonomi (<i>Economic Growth</i>) sebagai Variabel Dependen.</p>	<p><i>Local Revenue has a positive and significant effect on Capital Expenditure, Original Regional Revenues have a positive and significant effect on Economic Growth, Matching Grant has a positive and significant effect on Capital Expenditure, Matching Grant has a positive and significant effect on Economic Growth, and Capital Expenditure has negative and insignificant effect on Economic Growth.</i></p>	<p><i>International Journal of Business and Management Invention ISSN (Online): 2319 – 8028, ISSN (Print): 2319 – 801X www.ijbmi.org // Volume 6 Issue 6 // June. 2017 // PP— 12-17. Economics Faculty, Tadulako University, Palu, Indonesia.</i></p>
<p>Ni putu Santi Suryantini, Ni putu Ayu Darmayanti, dan Ica Rika Candraninggrat (2018)</p>	<p>- Menggunakan Belanja Modal sebagai Variabel Dependen.</p>	<p>- Menggunakan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Independen - Menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Dependen.</p>	<p><i>The relationship between regional financial performance was significant to capital expenditure, The relationship of capital expenditure to regional economic growth is not significant and The relationship of regional financial performance to economic growth is not significant.</i></p>	<p><i>International Journal of Economics, Commerce and Management. United Kingdom Vol. VI, Issue 11, Nov 2018. ISSN 2348 0386. Economics and Business Faculty, Udayana University, Bali.</i></p>

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan serta Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018.
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal secara Parsial pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018.
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal secara Simultan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan serta Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal secara Parsial pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal secara Simultan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun empiris, khususnya mengenai masalah Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi

Dapat menjadi referensi dan menetapkan suatu strategi untuk pertimbangan dalam solusi untuk menanggulangi masalah keuangan daerah, khususnya di bidang Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal.

3. Bagi Peneliti Lain

a. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

b. Sebagai pelengkap atau pemutakhiran penelitian serupa yang sebelumnya telah banyak dilakukan namun mungkin dalam kondisi ekonomi yang berbeda.

c. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang akuntansi sektor publik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat melalui data dari *website* Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat yang menyajikan data valid mengenai perekonomian di Indonesia.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan oleh penulis terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.